



**RENCANA KERJA PERUBAHAN
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN
MENENGAH DAN TENAGA KERJA KABUPATEN
BALANGAN
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan dapat diselesaikan dan ditetapkan di dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan Nomor : 050.24/036/SK/DKUKMTK- BLG/2022 pada tanggal 11 Agustus 2024.

Dalam rangka untuk menunjang visi misi Bupati/Wakil Bupati Balangan tahun 2021-2026 yaitu "**Membangun Desa, Menata Kota, Menuju Balangan yang Lebih Maju dan Sejahtera**". Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja akan melaksanakan kegiatan dan mengampu pekerjaan dari sebagian kewenangan Pemerintah Kabupaten Balangan.

Kami menyadari bahwa penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan tahun 2024 ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu kami sangat mengharapkan masukan dari berbagai pihak demi kesempurnaan penyusunan Perubahan Renja ini agar dapat dijadikan pedoman dan dasar penilaian pencapaian tujuan dan tugas pokok Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan tahun 2024.

Harapannya, semoga penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini bermanfaat bagi pembangunan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dan Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi serta memberikan kontribusi positif bagi masyarakat di Kabupaten Balangan.

Batunandi, Agustus 2024

Kepala Dinas,



ABDURRAHMAN ARRAHIMI, S.Pi

Pembina Tk. I/IV/b

NIP. 19681117 199703 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022	4
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian Indikator s/d Triwulan II Tahun 2022	4
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	28
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	40
2.4 Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD Tahun 2022	44
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	66
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	67
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	67
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	69
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH....	52
4.1 Analisa Sosial Ekonomi	52
4.2 Program dan Kegiatan	57
BAB V PENUTUP	69

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan s/d Triwulan II Tahun 2022.....	5
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan	29
Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD Tahun 2022 Kabupaten Balangan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan	45
Tabel 4.1 Program dan Kegiatan	64

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan tahun 2023 ini merupakan dokumen komprehensif berwawasan 1 (satu) tahun. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan serta perwujudan program dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026 yang berkedudukan sebagai dokumen perencanaan induk Kabupaten Balangan untuk lima tahun ke depan.

Penyusunan Perubahan Renja ini memuat program, kegiatan, tujuan, sasaran dan target yang ingin dicapai oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah di tahun 2023 dengan fokus utama adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dijelaskan bahwa perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya pada tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan dalam pelaksanaannya sampai dengan semester satu pada tahun perencanaan atau tahun berjalan ini telah ditemukan berbagai kondisi yang layak dijadikan dasar pertimbangan untuk melakukan perubahan atas dokumen Renja tahun 2023. Kondisi ini diperoleh dari hasil evaluasi atas kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan ke dua tahun 2023, dimana beberapa poin yang ditemukan, antara lain sebagai berikut :

- a. Perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan penganggaran daerah yang berdampak terhadap pagu yang mengakibatkan terjadinya penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, penambahan atau penghapusan kegiatan;
- b. Perlunya dilakukan pergeseran anggaran antar program, kegiatan maupun antar jenis belanja serta perubahan lokasi dan/atau kelompok sasaran kegiatan;
- c. Adanya kegiatan baru yang harus ditampung dalam perubahan tahun 2023 sebagai upaya untuk mempercepat pencapaian visi dan misi Kabupaten Balangan.

Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan penyusunan Perubahan Renja tahun 2023. Hal ini agar konsistensi dan keselarasan serta kesinambungan pencapaian visi dan misi lebih efektif dan efisien.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Renja tahun 2023 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan ini merujuk pada :

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Renja tahun 2023 ini disusun dengan maksud untuk memberikan arah perencanaan, kebijakan dan program satuan kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan pada tahun 2023. Dengan tujuan untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan di tahun 2023 yang sejalan dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan program Kepala Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Perubahan Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian Indikator s/d Triwulan II Tahun 2023
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD Tahun 2023
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1 Analisa Sosial Ekonomi
- 4.2 Program dan Kegiatan

BAB V. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian Indikator s/d Triwulan II Tahun 2024

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan pada tahun 2024 secara keseluruhan melaksanakan 11 Program, 9 Program termasuk dalam target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan. Penetapan indikator kinerja pada tingkat sasaran dan kegiatan merupakan prasyarat mutlak bagi pengukuran kinerja dari keberhasilan/kegagalan program tersebut. Secara keseluruhan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan telah menetapkan kelompok indikator kinerja untuk masing-masing program tersebut, walaupun untuk beberapa program indikator kinerja *outcome*-nya belum seluruhnya dapat diukur tingkat capaiannya, sehingga ada beberapa program yang menggunakan indikator sasaran sebagai tolok ukur untuk menilai capaian kinerja, Indikator sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel 2.1 dibawah ini

:

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan s/d Triwulan II Tahun 2024

URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN (N-3) TH 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN N-1) TH 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
				TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2) TH 2023	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2) TH 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN N-1) TAHUN 2024	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7= (6/5)	8	9 = (4 +6+8)	10 = (9/3)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH	82.2	74.98	74.4	74.4	100.00	76.40	74.4	90.51
	PERSENTASE TEMUAN BPK YANG DITINDAKLANJUTI	100	100	100	100	100.00	100	100	100
	NILAI IKM PERANGKAT DAERAH	95.5	77.84	87.96	87.96	100.00	88.30	87.96	92.10
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	100	100	100	100	100.00	100	50	50
Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	14	1	2	2	100.00	2	5	50
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD (Laporan)	32	2	5	5	100.00	5	12	27.7

URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGK AT DAERAH) TAHUN 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN (N- 3) TH 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKA T DAERAH TAHUN N-1) TH 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
				TARGET RENJA PERANGKA T DAERAH TAHUN (N- 2) TH 2023	REALISASI RENJA PERANGKA T DAERAH TAHUN (N- 2) TH 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN N-1) TAHUN 2024	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7= (6/5)	8	9 = (4 +6+8)	10 = (9/3)
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Baik (%)	100	100	100	100	100.00	100	50	50
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	3178	238	546	546	100.00	630	1414	39.87
Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD (Dokumen)	84	12	12	12	100.00	12	36	50
Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Baik (%)	100	100	100	100	100.00	100	50	50
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan (Orang)	50	4	5	5	100.00	5	14	65
Administrasi Umum perangkat daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Baik (%)	100	100	100	100	100.00	100	50	50
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (Paket)	7	1	1	1	100.00	1	3	57.14

URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN (N-3) TH 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN N-1) TH 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
				TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2) TH 2023	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2) TH 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN N-1) TAHUN 2024	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7= (6/5)	8	9 = (4 +6+8)	10 = (9/3)
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Paket)	35	16	6	6	100.00	2	24	54.29
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	3					1	1	0
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (Paket)	14	4	2	2	100.00	2	8	57.14
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (Dokumen)	21	3	3	3	100.00	3	12	57.14
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (Laporan)	7	6	1	1	100.00	1	8	57.14
Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan (%)	100	100	100	100	100.00	100	50	50
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	18					2	2	0.11

URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGK AT DAERAH) TAHUN 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN (N- 3) TH 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKA T DAERAH TAHUN N-1) TH 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
				TARGET RENJA PERANGKA T DAERAH TAHUN (N- 2) TH 2023	REALISASI RENJA PERANGKA T DAERAH TAHUN (N- 2) TH 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN N-1) TAHUN 2024	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7= (6/5)	8	9 = (4 +6+8)	10 = (9/3)
Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan (Unit)	51		9	9	100.00	0	0	17.65
Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang Baik (%)	100	100	100	100	100.00	100	50	50
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (Laporan)	7	3	1	1	100.00	1	5	57.14
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (Laporan)	7	3	1	1	100.00	1	5	57.14
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang Baik (%)	100	100	100	100	100.00	100	50	50
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (Unit)	55	35	35	35	100.00	30	16	29.09
Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	100	14	97	97	100.00	92	56	56

URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGK AT DAERAH) TAHUN 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN (N- 3) TH 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKA T DAERAH TAHUN N-1) TH 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
				TARGET RENJA PERANGKA T DAERAH TAHUN (N- 2) TH 2023	REALISASI RENJA PERANGKA T DAERAH TAHUN (N- 2) TH 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN N-1) TAHUN 2024	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7= (6/5)	8	9 = (4 +6+8)	10 = (9/3)
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	4	1					1	25
Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)	6	1				1	2	33.33
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Rasio Kebutuhan Tenaga Kerja Terhadap Persediaan Tenaga Kerja	30	0	0	0	0	30	0	100%
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga kerja Mikro	70	0	0	0	0	25	0	35%
enyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	5	1	1	1	100%	0	2	20%

PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Terampil Sesuai Kebutuhan Dunia Kerja	60					10		
Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang kompeten sesuai kebutuhan dunia kerja	496					60		
Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun	1000					496		
Koordinasi lintas lembaga dan kerja sama dengan sektor swasta untuk penyediaan instruktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja	Jumlah kesepakatan/koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas pada tahun	10					644		
Pengadaan sarana pelatihan kerja kabupaten/kota	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana pelatihan kerja	10					2		
Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan vokasi bagi pencari kerja berdasarkan unit kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun	750					0		
Pembinaan lembaga pelatihan kerja	Jumlah LPKS yang melaksanakan pelatihan sesuai kebutuhan dunia kerja	10					496		
Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta	Jumlah lembaga pelatihan swasta yang dibina	36					10		
Konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil	Persentase peningkatan produktivitas perusahaan kecil	25					10		

Pelaksanaan konsultasi produktivitas kepada perusahaan kecil	Jumlah Perusahaan kecil yang mendapat konsultasi peningkatan produktivitas	100					25		
Pengukuran produktivitas tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah tenaga kerja yang kompeten	1000					1000		
Pengukuran kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	Jumlah dokumen hasil pengukuran produktivitas dan daya saing tenaga di tingkat daerah	3					1		
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Kebutuhan Kerja yang Terpenuhi	60					60		
Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kerjasama antar Kerja	100					100		
Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	3750					60		
Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	150					20		
Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	25					5		
Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	110					20		
Penerbitan izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase LPTKS yang Aktif	25					25		
Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	5					2		
Pengelola Informasi Pasar Kerja	Persentase Informasi Pasar Kerja yang disebarluaskan	100					100		
Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	1					12		
Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	100					10		
Perlindungan PMI (Pra dan	Persentase CPM/PMI	100					0		

Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten Balangan	yang Terlayani								
Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	12					0		
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase tenaga kerja yang terlindungi hak-haknya	90					90		
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan bagi Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	100					100		
Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WI.KP Online	40					3		
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	6					1		
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perkara/Pengaduan HI yang difasilitasi Penyelesaian	100					100		
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	100					3		
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	100					3		
Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	4					1		
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	PERSENTASE KOPERASI AKTIF	30	0	63.39	63.39	100.00	30	63.39	96.05

Pemeriksaan dan pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi Taat Peraturan	30	0	32.39	32.39	100.00	30	32.39	95.26
Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan (Unit Usaha)	26					6	0	0

URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGK AT DAERAH) TAHUN 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN (N- 3) TH 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKA T DAERAH TAHUN N-1) TH 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
				TARGET RENJA PERANGKA T DAERAH TAHUN (N- 2) TH 2023	REALISASI RENJA PERANGKA T DAERAH TAHUN (N- 2) TH 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN N-1) TAHUN 2024	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7= (6/5)	8	9 = (4 +6+8)	10 = (9/3)
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	PERSENTASE KOPERASI DENGAN SDM YANG KOMPETEN	50	100	100	100	100.00	50	100	111.11
Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ kota	Persentase Koperasi yang Memperoleh Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	50	44.7	20.54	20.54	100.00	50	20.54	85.58
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM Yang memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang)	352	37	85	85	100.00	40	222	63.07

URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGK AT DAERAH) TAHUN 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN (N- 3) TH 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKA T DAERAH TAHUN N-1) TH 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
				TARGET RENJA PERANGKA T DAERAH TAHUN (N- 2) TH 2023	REALISASI RENJA PERANGKA T DAERAH TAHUN (N- 2) TH 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN N-1) TAHUN 2024	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7= (6/5)	8	9 = (4 +6+8)	10 = (9/3)
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	PERSENTASE USAHA MIKRO YANG MEMENUHI KUALIFIKASI STANDAR KOMPETENSI USAHA	4	55	60	60	100.00	4	60	75
Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	Persentase Usaha Mikro Yang Terfasilitasi Pemberdayaan	0.15	0.25	0.27	0.27	100.00	0.15	0.27	67.5

URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGK AT DAERAH) TAHUN 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN (N- 3) TH 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKA T DAERAH TAHUN N-1) TH 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
				TARGET RENJA PERANGKA T DAERAH TAHUN (N- 2) TH 2023	REALISASI RENJA PERANGKA T DAERAH TAHUN (N- 2) TH 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN N-1) TAHUN 2024	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7= (6/5)	8	9 = (4 +6+8)	10 = (9/3)
Pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro	Jumlah unit Usaha yang telah melaksanakan Kemitraan usaha mikro (Unit Usaha)	28	12	12	12	100.00	16	12	42.86
Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro	Jumlah unit Usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro (Unit Usaha)	160					40	0	0
Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata (Unit Usaha)	12017					11717	11030	91.79
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	PERSENTASE USAHA MIKRO YANG SKALA USAHANYA BERTAMBAH	0.56	2,53	0.53	0.53	100.00	4.55	0.53	72.60
Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil	Persentase Usaha Mikro yang Skala Usahanya Meningkat	0.83	2,53	0.63	0.63	100.00	0.83	0.63	62.38

URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN (N-3) TH 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN N-1) TH 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
				TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2) TH 2023	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2) TH 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN N-1) TAHUN 2024	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7= (6/5)	8	9 = (4 +6+8)	10 = (9/3)
Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi (Unit Usaha)	531					509	0	0
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase warga transmigrasi yang terampil	16					16		
Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah warga transmigrasi yang terampil	20					20		
Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Bersasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3					3		
Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Jumlah Pelaporan Kelayakan Lingkungan dan Pemukiman Transmigrasi (yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang)	3					1		
PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Lahan usaha yang Dikelola oleh Warga Transmigrasi	19.5					19.5		
Pengembangan Satuan	Jumlah Kepala Keluarga	20					20		

Pemukiman pada Tahap Kemandirian	Trasnigran yang dibina								
Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang dibina	54					20		
Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam Rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	1					1		

Pada Tabel 2.1 disajikan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja perangkat daerah dan pencapaian renstra perangkat daerah sampai dengan Triwulan II tahun 2024. Jika dilihat dari tingkat penyerapan anggaran pada kegiatan-kegiatan Belanja Daerah untuk tahun 2024 sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 33.043.661.719,- atau 85.69% dari total anggaran keseluruhan sebesar Rp. 45.463.783.518,- (APBD).

Permasalahan anggaran cukup menjadi kendala tersendiri mengingat ketersediaan anggaran belum mencukupi kebutuhan/pengajuan anggaran dari Perangkat Daerah, sehubungan dengan hal tersebut pelaksanaan program dan kegiatan akan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Permasalahan lain yang timbul adalah tidak adanya mobil operasional serta penurunan masa manfaat kendaraan dinas jabatan kepala dinas dan sekretaris dinas sebagai sarana transportasi mengingat tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan dengan kegiatan antara lain, koordinasi, konsultasi, pengumpulan data, penyuluhan dan pembentukan koperasi, pembinaan, evaluasi dan monitoring yang mobilitasnya cukup tinggi selain itu mengingat jangkauan dan pelaksanaan cukup luas dan padat seringkali mengalami kendala sehingga mengakibatkan tertundanya pelaksanaan kegiatan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan sampai dengan Triwulan II tahun 2023 telah melaksanakan sebagian kegiatan-kegiatan dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat melalui Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian dan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan ada yang telah melampaui target yang ditetapkan, akan tetapi meskipun target yang ditetapkan dalam renstra ada yang telah tercapai akan tetapi kegiatan tersebut tetap dilaksanakan untuk terus menjaga agar tidak terjadi penurunan capaian kinerja untuk masing-masing Urusan Pemerintahan yang diampu oleh SKPD. Untuk lebih jelas terkait rincian pencapaian kinerja pelayanan yang telah dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 2.2 dibawah ini :

**Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten
Balangan**

2.2.1 Capaian Kinerja Indikator Angka Pengangguran Terbuka

Tabel 2.1 Capaian Kinerja Indikator Angka Pengangguran Terbuka

Indikator	2020	2021		Kategori Capaian Kinerja	Capaian 2020 thdp 2026	
	Capaian	Target	Realisasi			Capaian
Angka Pengangguran Terbuka	103,53%	2,46	2,44	100,81%	Sangat Tinggi	93,91%
Rata-rata Capaian				100,81%		

Kondisi yang digambarkan pada indikator sasaran Angka Pengangguran Terbuka tahun 2021 sesuai dengan tabel sebagai berikut :

- a. Angka Pengangguran Terbuka pada tahun 2021 sebagaimana tabel adalah sebesar 2,44 Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2020) dengan realisasi 2,46, hal ini berarti ada penurunan pada pencapaian di tahun 2021
- b. Melihat tabulasi kategori indikator capaian kinerja, maka indikator realisasi investasi ini dapat dikatakan sangat tinggi
- c. Menurunnya angka pengangguran terbuka, terlihat bahwa dari indikator sasaran strategis kedua Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan yaitu Angka Pengangguran Terbuka dengan target di tahun 2021 sebesar

2,46% dan realisasi yang dicapai 2,44%. Dari hasil realisasi tersebut hasil capaian kinerja untuk indikator Angka Pengangguran Terbuka sebesar 100,81 % dengan kategori capaian **SangatTinggi** (di atas 100%).

- d. Hasil capaian tersebut berdasarkan jumlah pengangguran sebesar 1.768 jiwa berbanding dengan jumlah angkatan kerja sebesar 72.745 jiwa. Dalam hal ini capaian kinerja sudah melebihi target yang ditetapkan.

Analisa Kendala

Permasalahan/ hambatan pada proses pencapaian target ini adalah Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Balangan yang bertambah pasca kelulusan Siswa SMA dan kuliah sehingga menambah potensi peningkatan pada jumlah pengangguran terbuka.

Sejak terjadinya pandemi covid-19 di Kalimantan Selatan mengakibatkan menurunnya perekonomian, yang juga berdampak menurunnya lapangan usaha yang mempengaruhi aktivitas beberapa sektor, seperti sektor pertambangan, sektor perdagangan, sektor industri, rumah makan dan lain-lain.

Disamping itu juga sulitnya mendeteksi angka penempatan tenaga kerja, karena penerima kerja ataupun pekerja yang sudah dapat pekerjaan tidak lapor ke DPMPTSPPTK Kabupaten Balangan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan:

1. Meningkatnya kesempatan bagi para pencari kerja, ini dapat dilihat dari jumlah lowongan kerja yang tersedia baik melalui kegiatan Bursa Kerja Online ataupun lowongan yang dilaporkan perusahaan pemberi kerja serta lowongan CPNS/ Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Balangan Tahun 2021
2. Meningkatnya jumlah pencari kerja yang memiliki keterampilan sehingga mampu untuk bersaing di dunia kerja ataupun berusaha mandiri dengan keterampilan yang telah dimiliki.

Rencana Aksi dan Tindak Lanjut

Salah satu upaya yang perlu dilakukan dalam rangka mengatasi masalah pengangguran adalah dengan meningkatkan keahlian, keterampilan, dan

produktivitas kerja bagi sumber daya manusia agar mampu mengolah potensi sumber daya alam di pedesaan dan mampu menciptakan lapangan kerja baru secara mandiri atau berwirausaha. Adapun untuk mewujudkan hal tersebut langkah yang akan dilakukan, antara lain :

1. Meningkatkan jumlah paket pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja untuk para pencari kerja
2. Mengoptimalkan Bursa Kerja Online untuk menghadirkan kesempatan kerja yang lebih banyak bagi pencari kerja
3. Mengadakan pelatihan keterampilan dan pelatihan kewirausahaan di pedesaan serta meningkatkan peran UMKM.
4. Meningkatkan mutu pendidikan dan fasilitas pelatihan guna meningkatkan kemampuan pencari kerja agar sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
5. Dan untuk menangani angka penempatan kerja yaitu dengan melakukan jemput bola/menyurati kepihak penerima pekerjaan untuk meminta/melaporkan data pencari kerja yang telah diterima bekerja.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang ditetapkan dalam penetapan kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan dengan realisasi pelaksanaannya. Tingkat capaian kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan dapat dilihat dalam tabel TC-30

Tabel 2.1 Capaian Kinerja Indikator Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi

Indikator	2020	2021			Kategori Capaian Kinerja	Capaian 2020 thdp 2026
	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		
Persentase Koperasi Berpredikat Sehat	0	8.45	8.45	100 %	Sangat Tinggi	93,91%
Persentase Usaha Mikro Naik Kelas	0	25.74	25.74	100 %	Sangat Tinggi	25.84 %
Rata-rata Capaian				100 %		

Untuk Bidang Koperasi dan Usaha Mikro sampai dengan Triwulan II tahun 2024 menyelenggarakan beberapa kegiatan dengan hasil-hasil yang dicapai diantaranya melakukan pengawasan koperasi aktif yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), hasil pengawasan didapatkan yaitu jumlah koperasi yang telah melaksanakan RAT sampai dengan bulan juni 2023 ada sebanyak 20 unit koperasi.

DAFTAR KOPERASI YANG SUDAH MELAKSANAKAN RAPAT ANGGOTA TAHUNAN (RAT) TAHUN 2023

No	Nama Koperasi	Pelaksanaan RAT
1	KPN BALANGAN	22 Januari 2023
2	KUD SIDO MUKTI	24 Januari 2023
3	KSU PULAWANIN MAKMUR SEJAHTERA	26 Januari 2023
4	KUD MAKARTI MANUNGGAL	27 Januari 2023
5	KPRI SANGGAM	12 Februari 2023
6	KPRI SEJAHTERA MANDIRI	22 Februari 2023
7	KOPDIT RANU WELUM	28 Februari 2023
8	KSU BALANGAN AGRO SEJAHTERA	7 Maret 2023
9	KSU RAGA BERSAMA	19 Maret 2023
10	KPRI PERPUSDA MAJU BERSAMA	21 Maret 2023
11	KUD RAWA SUBUR	24 Maret 2023
12	KSU KARTIKA JAYA	02 April 2023
13	KPN AL IKHLAS	9 Mei 2023
14	PRIMKOPPOL	8 Juni 2023
15	KSU MANTIMIN	19 Juni 2023
16	KSU SUNGAI KIHUNG LESTARI	23 Juni 2023
17	KOPBUN MAKMUR	24 Juni 2023
18	KOPDA FAJAR HARAPAN	25 Juni 2023
19	KUD KARYA BERSATU	26 June 2023
20	KSU MANUNTUNG	30 Juni 2023

Adapun untuk Jumlah Koperasi, dan UMKM sampai dengan 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah Koperasi sebanyak 112 unit koperasi jumlah koperasi sampai dengan Triwulan II tahun 2024, dimana Koperasi aktif sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 adalah berjumlah 71 unit koperasi atau sebesar 63,39 % dan yang tidak aktif berjumlah 41 unit koperasi atau sebesar 36,61 %. Adapun kriteria koperasi aktif adalah :
 - a. Memiliki badan hukum.
 - b. Melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT).
 - c. Mempunyai/melaksanakan kegiatan usaha.
 - d. Tersusunnya laporan kegiatan dan rencana kerja bagi koperasi.

2. Jumlah UMKM sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 berjumlah sebanyak 11.030 unit usaha. Dengan rincian Jumlah Usaha Mikro sebanyak 11.030 unit usaha, Usaha Kecil sebanyak 0 unit usaha dan Usaha Menengah sebanyak 0 unit usaha. Jumlah ini masih sama dengan Triwulan I dikarenakan proses Tahapan Pendataan UMKM Kabupaten Balangan Tahun 2023 belum selesai di Triwulan II dan akan diselesaikan pada Triwulan III.

Kemudian juga telah melaksanakan pelatihan bagi Usaha Mikro berupa Desain dan Pengemasan Produk UMKM, diharapkan dengan pelatihan ini para pelaku UMKM dapat mendesain kemasan yang dapat menarik konsumen serta melakukan pengemasan produk dengan standar baik sehingga produk UMKM akan bertahan lebih lama.

Dalam rangka mendukung dan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi Nasional khususnya di Kabupaten Balangan, Dinas telah memberikan bantuan berupa Booth Kayu sebanyak 10 (sepuluh) buah dengan harapan mampu meningkatkan omzet para pelaku usaha mikro, dengan daftar penerima sebagai berikut:

**DAFTAR PELAKU USAHA MIKRO
YANG MENERIMA BANTUAN BOOTH KAYU**

NO	NAMA PESERTA	ALAMAT	JENIS USAHA
1	SANIAH	Desa Timbun Tulang RT. 01	Pedagang Eceran
2	MUNAWARAH	Desa Timbun Tulang RT. 03	Pedagang
3	HELMA	Desa Timbun Tulang RT. 01	Pedagang Eceran
4	ZHOFIRAH	Desa Timbun Tulang RT. 01	Menjahit & Dagang
5	MUHAMMAD SYUHADA	Desa Timbun Tulang RT. 02	Service Elektronik dan Dagang
6	MUHIBAH	Desa Timbun Tulang RT. 02	Pedagang Eceran
7	RUSITA	Desa Timbun Tulang RT. 02	Kuliner
8	SAMSIANOR	Desa Timbun Tulang RT. 02	Pedagang Eceran
9	MAIMUNAH	Desa Timbun Tulang RT. 03	Pedagang Eceran
10	AISYAH	Desa Timbun Tulang RT. 03	Kuliner

Bidang Perindustrian telah melaksanakan pelatihan teknik industri berupa pelatihan pembuatan produk kemasan kepada 10 IKM, pelatihan pembuatan kue kepada 20 IKM, pelatihan ecoprint kepada 10 IKM dan pelatihan pembuatan pangan berbasis bahan lokal kepada 13 IKM. Selain itu juga telah melaksanakan kegiatan fasilitasi IKM dalam hal pendaftaran merk/haki kepada 10 IKM dan fasilitasi pendaftaran halal produk kepada 6 IKM.

Selain itu Bidang Perindustrian juga mengirimkan peserta pelatihan untuk mengikuti kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan yaitu, pelatihan animasi proses produksi Se-Kalimantan Selatan kepada 2 IKM, pelatihan penumbuhan WUB industri pangan (bahan pisang) kepada 25 IKM, pelatihan desain grafis kemasan Produk kepada 1 IKM dan sosialisasi dan bimbingan teknis pengisian aplikasi pendataan Bagi IKM kepada 2 IKM.

Adapun untuk Jumlah Industri Kecil Menengah (IKM) sampai dengan bulan Juni 2023 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah IKM sampai dengan triwulan II Tahun 2023 berjumlah sebanyak 2.361 unit usaha dengan seluruhnya adalah Industri Kecil.

Untuk Urusan Perdagangan pada sektor sarana dan prasarana perdagangan sampai dengan 30 Juni 2023 telah melaksanakan kegiatan pembersihan pasar, yaitu pasar halong, pasar paringin, pasar S.Lewan dan pasar modern, melaksanakan kegiatan relokasi dan penataan pedagang terminal sebanyak 28 orang pedagang ke area pasar paringin serta telah melaksanakan pembinaan pedagang pujasera kepada 55 pedagang yang telah direlokasi sebelumnya di pasar paringin.

Urusan Perdagangan pada sektor standardisasi, stabilitasi dan pengawasan perdagangan sampai dengan 30 Juni 2023 telah melaksanakan kegiatan pendataan harga bahan pokok dan barang penting sebanyak 15 kali di 4 (empat) pasar, yaitu Pasar Paringin, Pasar Adaro, Pasar Batumandi dan Pasar Bihara (sewaktu waktu) guna mengukur tingkat stabilisasi harga barang kebutuhan pokok. Dalam rangka penanganan inflasi di daerah telah dilaksanakan kegiatan menggelar pasar murah sebanyak 22 kali, yaitu pasar murah di Desa Mayanau Kecamatan Tebing Tinggi, pasar murah di Desa Sikontan Kecamatan Awayan, pasar murah di Desa Tanah Habang Kiri Kecamatan Lampihong, pasar murah di Desa Inan Kecamatan Paringin Selatan, pasar murah di Lapangan Martasura Kecamatan Paringin, pasar

murah di Desa Lasung Batu Kecamatan Paringin, pasar murah di Desa Bungin Kecamatan Paringin Selatan, pasar murah di Desa Binjai Kecamatan Paringin Selatan, pasar murah di Desa Sumber Rejeki Kecamatan Juai, pasar murah di Halaman Kantor Kecamatan Paringin Selatan (Sebanyak 3 (Tiga) Kali), pasar murah di Desa Mungkur Uyam Kecamatan Juai, pasar murah di Desa Batu Merah Kecamatan Lampihong, pasar murah di Panggung Kecamatan Paringin Selatan, pasar murah di Desa Lok Batu Kecamatan Batumandi, pasar murah di Desa Pudak Kecamatan Paringin Selatan, pasar murah di Desa Hujan Mas Kecamatan Paringin, pasar murah di Desa Gunung Batu Kecamatan Tebing Tinggi, pasar murah di Desa Hauwai Kecamatan Halong, pasar murah di Desa Lamida Bawah Kecamatan Paringin, pasar murah di Gedung Sanggam Kecamatan Paringin, pasar murah di Halaman Kecamatan Paringin.

Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam upaya terhadap pencapaian visi dan misi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan serta capaian terhadap target dari program prioritas RPJMD ada beberapa hambatan serta permasalahan yang kami hadapi saat ini sehingga berpengaruh pada pencapaian target kinerja SKPD kami, yang secara tidak langsung juga berpengaruh terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah dalam upaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat balangan berbasis pertanian dan perkebunan, pariwisata dan ekonomi kreatif.

Secara garis besar ada beberapa permasalahan yang kami hadapi sampai dengan triwulan II tahun 2023 ini, antara lain :

1. Masih kurangnya tenaga aparatur di masing-masing bidang sehingga pendataan/pemetaan terhadap pelaku usaha industri/usaha mikro/pedagang sebagai bahan informasi untuk pertumbuhan wirausaha baru sedikit terhambat.
2. Masih kurangnya produk lokal yang mampu bersaing dipasar global antara lain karena kemasan yang masih belum menarik/tradisional serta ketersediaan bahan baku yang kadang sulit di dapat dalam jumlah banyak untuk waktu yang singkat, sehingga membuat investor cenderung ragu untuk berinvestasi selain itu masih kurangnya promosi-promosi terhadap produk unggulan membuat produk unggulan tersebut kurang dikenal oleh masyarakat maupun calon investor.

3. Masih kurangnya akses permodalan bagi koperasi dan usaha mikro kedalam 2 (dua) program pemerintah daerah yaitu Program Sanggam Babungas dan Program Sanggam Bakabun sebagai upaya untuk pengembangan usaha koperasi dan usaha mikro yang berpengaruh terhadap usaha yang dijalankan sering sulit untuk berkembang.
4. Tidak adanya kendaraan mobil dinas operasional layak yang mendukung aktifitas kerja di lapangan.
5. Belum sepenuhnya mandiri dalam pelaksanaan kegiatan tera/tera ulang ditahun ketiga renstra 2021-2026 di Kabupaten Balangan. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 segala kegiatan terkait metrologi legal (termasuk tera/tera ulang) dilaksanakan secara mandiri oleh tiap kabupaten/kota. Kabupaten Balangan belum dapat melaksanakan secara penuh kegiatan metrologi legal dikarenakan masih adanya peralatan yang belum dimiliki lengkap sebagai unit metrologi legal dan keterbatasan jumlah tenaga fungsional penera Kabupaten Balangan, yang masih memerlukan bantuan tenaga penera dari BSML dalam pelaksanaan tera/tera ulang di Kabupaten Balangan tahun ini.
6. Belum optimalnya pembinaan kepada pedagang dan pedagang masih melanggar aturan akan tata letak dagangan.

Hal-hal yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan perubahan renja tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Perlunya meningkatkan kembali pengembangan dan pemasaran terhadap produk lokal unggulan daerah.
2. Perlu terus dilakukan pembinaan dan peningkatan kompetensi kewirausahaan bagi pelaku usaha (Usaha Mikro dan IKM) agar produk yang dihasilkan dapat berkelanjutan serta mampu bersaing dipasar global.
3. Perlunya fasilitasi kemitraan dengan pihak ketiga untuk meningkatkan kemampuan permodalan bagi koperasi dan Usaha Mikro.
4. Mendorong peningkatan kinerja koperasi agar mampu bersaing dengan perbankan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya.
5. Perlunya pendataan pedagang yang lebih komprehensif sebagai datadasar pelaksanaan tugas dan fungsi bidang perdagangan.
6. Perlunya perbaikan fasilitas sarana dan prasarana perdagangan.
7. Perlunya kendaraan mobil dinas operasional lapangan.
8. Perlunya pendataan UTTP dan pengawasan perdagangan agar konsumen terlindungi.

Dari uraian tersebut menjadi dasar dalam merumuskan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran pada tahun 2023, yaitu perluasan dan penguatan akses pemasaran produk usaha mikro, pembinaan dan peningkatan kompetensi bagi pelaku usaha koperasi dan usaha mikro/IKM, pengembangan usaha koperasi dan usaha mikro, pembinaan dan penataan pegadang menjadi fokus untuk dilaksanakan.

Beberapa masalah dan tantangan pokok yang akan dihadapi ditahun mendatang adalah sebagai berikut :

1. Rendahnya koperasi aktif yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT).
2. Jumlah SDM pejabat fungsional pengawas koperasi dan penyuluh koperasi yang ada di daerah yang masih sangat terbatas untuk melakukan pengawasan dan penyuluhan terhadap seluruh koperasi yang ada.
3. Belum optimalnya penggunaan sistem informasi atau database usaha mikro yang tersedia.
4. Penerapan dan penguasaan teknologi masih sangat terbatas hal ini terlihat dari total 2.361 IKM, baru 238 IKM atau sebesar 10,08% yang sudah mendapatkan pelatihan teknologi industri dari total seluruh IKM. Hal ini berdampak kepada biaya produksi menjadi mahal dan kualitas barang serta produk inovatif yang dihasilkan sangat terbatas.
5. Terbatasnya kemampuan pelaku usaha perdagangan dalam mengakses permodalan, memanfaatkan peluang pasar dan kemampuan SDM pelaku usaha sehingga menghambat pertumbuhan nilai transaksi sektor perdagangan (volume perdagangan).

Setelah kita ketahui berbagai macam permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja, maka dapat ditentukan isu-isu penting dalam penyelenggaraansesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja sebagai berikut :

1. Meningkatkan daya saing kelembagaan dan usaha koperasi dan usaha mikro terhadap persaingan ekonomi global, legalitas dan peluang usaha koperasi, dengan adanya legalitas yang dimiliki oleh koperasi dapat lebih mudah mengakses ke sumber-sumber daya produktif, seperti akses teknologi, pasar dan pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM).

2. Peningkatan kualitas penyajian data dan Informasi dalam penyusunan kebijakan koperasi (data keragaan) dan usaha mikro (aplikasi sidumba).
3. Meningkatkan daya saing IKM dalam penerapan teknologi industri dan bantuan alat produksi.
4. Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan.
5. Peningkatan nilai transaksi perdagangan (volume perdagangan).
6. Peningkatan perlindungan konsumen.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD Tahun 2024

Secara keseluruhan target kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada tahun 2021-2026 dapat tercapai dengan baik, meskipun ada beberapa sasaran dari kegiatan yang tidak sepenuhnya dapat tercapai. Dalam dokumen ini memuat informasi tentang rumusan kebutuhan program hasil review terhadap rancangan awal Perubahan RKPD tahun 2024 beserta indikator kinerja, besaran target dan besaran dana yang dibutuhkan untuk masing-masing program yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan, dapat dilihat pada tabel 2.3 dibawah ini :

**Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD Tahun 2023 Kabupaten Balangan
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian			Kebutuhan Dana (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		CAKUPAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN (%)	100	%	7,037,267,370	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		CAKUPAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN (%)	100	%	7,880,122,216	
									NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH	76.40	%		
									PERSENTASE TEMUAN BPK YANG DITINDAKLANJUTI	100	%		
									NILAI IKM PERANGKAT DAERAH	88.30	Nilai IKM		
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	12	Bulan	21,200,400	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	12	Bulan	21,200,400	
									Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	%		
1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	10,170,400	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	10,170,400	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Kab. Balangan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	5	Laporan	11,030,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Kab. Balangan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	5	Laporan	11,030,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian			Kebutuhan Dana (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD		realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD				Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD		realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD				
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Pelayanan Administrasi Keuangan	12	Bulan	6,026,331,920	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Pelayanan Administrasi Keuangan	12	Bulan	6,526,071,666	
									Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Baik	100	%		
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Balangan	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40	Orang/bulan	5,817,859,920	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Balangan	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40	Orang/bulan	6,253,775,666	
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12	Dokumen	208,472,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12	Dokumen	272,296,000	
III	Administrasi kepegawaian perangkat daerah		Jumlah Asn yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	12	Bulan	-	Administrasi kepegawaian perangkat daerah		Jumlah Asn yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	12	Bulan	-	
									Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Baik	100	%		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian			Kebutuhan Dana (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Balangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	Orang	-	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Balangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	Orang	-	
IV	Administrasi Umum perangkat daerah		Jumlah Pelayanan Administrasi Umum	12	Bulan	432,230,700	Administrasi Umum perangkat daerah		Jumlah Pelayanan Administrasi Umum	12	Bulan	692,564,000	
									Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Baik	100	%		
6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kab. Balangan	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1	Paket	13,677,100	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kab. Balangan	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1	Paket	71,290,300	
7	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Balangan	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4	Paket	117,386,500	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Balangan	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4	Paket	116,336,800	
8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kab. Balangan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2	Paket	32,894,500	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kab. Balangan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2	Paket	32,894,500	
9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1	Dokumen	8,267,700	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1	Dokumen	8,267,700	
10	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Balangan	Jumlah laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi	1	Laporan	260,004,900	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Balangan	Jumlah laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi	1	Laporan	463,774,700	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian			Kebutuhan Dana (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			dan konsultasi SKPD						dan konsultasi SKPD				
V	Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		Jumlah pengadaan barang penunjang urusan pemerintah Daerah	12	Bulan	80,109,200	Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		Jumlah pengadaan barang penunjang urusan pemerintah Daerah	12	Bulan	57,779,200	
									Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	100	%		
11	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Kab. Balangan	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	11	Unit	80,109,200	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Kab. Balangan	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	9	Unit	57,779,200	
VI	Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		Jumlah Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12	Bulan	331,658,800	Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		Jumlah Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12	Bulan	361,991,300	
									Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang Baik	100	%		
12	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Balangan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1	Laporan	135,289,700	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Balangan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1	Laporan	132,302,200	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kab. Balangan	Jumlah laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1	laporan	196,369,100	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kab. Balangan	Jumlah laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1	laporan	229,689,100	
VII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintahan daerah		Jumlah pemeliharaan barang milik Daerah sebagai penunjang urusan pemerintah Daerah	12	Bulan	145,736,350	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintahan daerah		Jumlah pemeliharaan barang milik Daerah sebagai penunjang urusan pemerintah Daerah	12	Bulan	220,515,650	
									Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang Baik	100	%		
14	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kab. Balangan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	50	Unit	123,815,750	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kab. Balangan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	50	Unit	198,595,050	
15	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Kab. Balangan	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	170	Unit	21,920,600	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Kab. Balangan	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	170	Unit	21,920,600	
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		PERSENTASE KOPERASI BERKUALITAS	4	%	72,167,600	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		PERSENTASE KOPERASI BERKUALITAS	4	%	72,167,600	
									PERSENTASE KOPERASI AKTIF	63.69	%		
VIII	Pemeriksaan dan pengawasan		Jumlah Koperasi yang dilakukan	6	Koperasi	72,167,600	Pemeriksaan dan pengawasan		Jumlah Koperasi yang dilakukan	28.17	Koperasi	72,167,600	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian			Kebutuhan Dana (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Pemeriksaan dan Pengawasan				koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Pemeriksaan dan Pengawasan				
									Persentase Koperasi Taat Peraturan	6	%		
16	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Jumlah koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	6	Unit usaha	22,824,800	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Jumlah koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	6	Unit usaha	22,824,800	
17	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Jumlah koperasi yang memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	23	Unit usaha	49,342,800	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Jumlah koperasi yang memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	23	Unit usaha	49,342,800	
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		PERSENTASE KOPERASI YANG MEMPEROLEH PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	10.18	%	39,046,400	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		PERSENTASE KOPERASI YANG MEMPEROLEH PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	10.18	%	39,046,400	
									PERSENTASE PESERTA	100	%		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian			Kebutuhan Dana (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
									PELATIHAN YANG LULUS KOMPETENSI KOPERASI				
IX	Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ kota		Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian yang Dilaksanakan	2	Kegiatan	39,046,400	Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ kota		Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian yang Dilaksanakan	2	Kegiatan	39,046,400	
									Persentase Koperasi yang Memperoleh Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	21:13	%		
18	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Kab. Balangan	Jumlah SDM Yang memahami Pengetahuan Perkoperasian	60	Orang	39,046,400	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Kab. Balangan	Jumlah SDM Yang memahami Pengetahuan Perkoperasian	60	Orang	39,046,400	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)		PERSENTASE USAHA MIKRO YANG LABANYA MENINGKAT	29	%	433,370,400	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)		PERSENTASE USAHA MIKRO YANG LABANYA MENINGKAT	29	%	444,850,200	
									PERSENTASE USAHA MIKRO YANG MEMENUHI KUALIFIKASI STANDAR KOMPETENSI USAHA	65.00	%		
									PERSENTASE USAHA MIKRO	0,15	%		

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian			Kebutuhan Dana (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
									YANG MENERAPKAN E-COMERCE				
X	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan		Jumlah Kegiatan Pendataan, Kemitraan dan Pelatihan Perijinan Usaha Mikro	6	Kegiatan	433,370,400	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan		Jumlah Kegiatan Pendataan, Kemitraan dan Pelatihan Perijinan Usaha Mikro	6	Kegiatan	444,850,200	
									Persentase Usaha Mikro yang Memperoleh Pendidikan dan Pelatihan Usaha mikro	0,37	%		
									Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru	3.70	%		
									Persentase Usaha Mikro yang Bermitera	0,15	%		
19	Pendataan potensi dan pengembangan usaha mikro	Kab. Balangan	Jumlah unit usaha yang produktif, bernilai tambah, memiliki akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi, dan restrukturisasi usaha koperasi	11,567	Unit usaha	139,143,100	Pendataan potensi dan pengembangan usaha mikro	Kab. Balangan	Jumlah unit usaha yang produktif, bernilai tambah, memiliki akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi, dan restrukturisasi usaha koperasi	11,567	Unit usaha	142,642,900	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian			Kebutuhan Dana (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			kewenangan kabupaten/kota						kewenangan kabupaten/kota				
20	Pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro	Kab. Balangan	Jumlah unit Usaha yang telah melaksanakan Kemitraan usaha mikro	16	Unit usaha	86,584,200	Pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro	Kab. Balangan	Jumlah unit Usaha yang telah melaksanakan Kemitraan usaha mikro	16	Unit usaha	94,564,200	
21	Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro	Kab. Balangan	Jumlah unit Usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	40	Unit usaha	207,643,100	Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro	Kab. Balangan	Jumlah unit Usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	40	Unit usaha	207,643,100	
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		PERSENTASE USAHA MIKRO YANG SKALA USAHANYA BERTAMBAH	1.13	%	993,259,000	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		PERSENTASE USAHA MIKRO YANG SKALA USAHANYA BERTAMBAH	4.38	%	2,074,138,700	
XI	Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil		Jumlah UKM yang skala usahanya meningkat	127	UMKM	993,259,000	Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil		Jumlah UKM yang skala usahanya meningkat	127	UMKM	2,074,138,700	
									Persentase Usaha Mikro yang Skala Usahanya Meningkat	4.38	%		
22	Fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan pemasaran, SDM, serta Desain dan teknologi	Kab. Balangan	Jumlah unit usaha mikro yang terfasilitasi dalam pengembangan produksi dalam dan pengolahan pemasaran, SDM, serta Desain dan teknologi	157	Unit usaha	993,259,000	Fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan pemasaran, SDM, serta Desain dan teknologi	Kab. Balangan	Jumlah unit usaha mikro yang terfasilitasi dalam pengembangan produksi dalam dan pengolahan pemasaran, SDM, serta Desain dan teknologi	157	Unit usaha	2,074,138,700	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian			Kebutuhan Dana (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		PERSENTASE PELAKU USAHA YANG MEMPEROLEH IZIN SESUAI DENGAN KETENTUAN (%)	12	%	57,010,000	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		PERSENTASE PELAKU USAHA YANG MEMPEROLEH IZIN SESUAI DENGAN KETENTUAN (%)	12	%	60,510,000	
									PERSENTASE PELAKU USAHA PERDAGANGAN YANG MEMPEROLEH IZIN SESUAI DENGAN KETENTUAN	12.00	%		
									PERSENTASE JUMLAH KEGIATAN PENGENDALIAN FASILITAS PENYIMPANAN BAHAN BERBAHAYA DAN PENGAWASAN DISTRIBUSI, PENGEMASAN DAN PELABELAN BAHAN BERBAHAYA DILAKSANAKAN	0	%		
XII	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan		Jumlah rekomendasi dan perizinan yang dikeluarkan (Bh)	660	Buah	35,230,000	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan		Jumlah rekomendasi dan perizinan yang dikeluarkan	660	Buah	38,730,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian			Kebutuhan Dana (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
									Jumlah Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan yang dikeluarkan	10	Buah		
23	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Balangan	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1	Dokumen	35,230,000	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Balangan	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1	Dokumen	38,730,000	
XIII	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri		Jumlah Pengusaha waralaba yang mempunyai Izin (Bh)	20	Buah	21,780,000	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri		Jumlah Pengusaha waralaba yang mempunyai Izin (Bh)	20	Buah	21,780,000	
									Jumlah Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Dalam Negeri	7	Buah		
24	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda	30	Dokumen	21,780,000	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda	30	Dokumen	21,780,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian			Kebutuhan Dana (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik		Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik				Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik		Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik				
	PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		PERSENTASE PENINGKATAN SAPRAS	60	%	2,105,855,500	PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		PERSENTASE PENINGKATAN SAPRAS	60	%	3,241,612,900	
									PERSENTASE PASAR DI KABUPATEN BALANGAN YANG MEMENUHI STANDAR KELAYAKAN PASAR	0	%		
XIV	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah pembangunan dan atau revitalisasi pasar (Bh)	1	Buah	1,876,461,500	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah pembangunan dan atau revitalisasi pasar (Bh)	1	Buah	3,005,218,900	
			Jumlah pasar yang dikelola (Bh)	4	Buah				Jumlah pasar yang dikelola (Bh)	4	Buah		
									Persentase Pasar yang direvitalisasi	75	%		
25	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Balangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	3	unit	907,126,400	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Balangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	3	unit	1,755,624,200	
26	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Balangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	4	unit	969,335,100	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Balangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	4	unit	1,249,594,700	
XV	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi		Persentase peningkatan	40	%	229,394,000	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi		Persentase peningkatan	40	%	236,394,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian			Kebutuhan Dana (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya		padagang yang tertata				Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya		padagang yang tertata				
									Persentase Pedagang yang Berjualan pada Tempatnya	40.00	%		
27	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen hasil Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1	Dokumen	156,487,600	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen hasil Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1	Dokumen	159,987,600	
28	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen hasil Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1	Dokumen	72,906,400	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen hasil Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1	Dokumen	76,406,400	
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		PERSENTASE STABILITAS DAN JUMLAH KETERSEDIAAN HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK (%)	7,6	%	421,864,000	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		PERSENTASE STABILITAS DAN JUMLAH KETERSEDIAAN HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK	7.60	%	564,145,600	
XVI	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		Jumlah pelaksanaan kegiatan pengendalian Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Kali)	60	Kali	421,864,000	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		Jumlah pelaksanaan kegiatan pengendalian Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	60	Kali	564,145,600	
									Jumlah Pelaksanaan Pasar Murah	42	Kali		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian			Kebutuhan Dana (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	Kab. Balangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	12	Laporan	75,337,500	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	Kab. Balangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	12	Laporan	101,437,300	
30	Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Jumlah laporan Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1	Laporan	346,526,500	Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Jumlah laporan Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1	Laporan	462,708,300	
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		PERSENTASE PENINGKATAN PENDAPATAN PELAKU USAHA SETELAH PROMOSI	29.05	%	2,205,017,000	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		PERSENTASE PENINGKATAN PENDAPATAN PELAKU USAHA SETELAH PROMOSI	29.05	%	2,419,079,800	
									PERSENTASE PENINGKATAN PELAKU USAHA EKSPOR	30	%		
XVII	Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah penyelenggaraan promosi(Kali)	1	Kali	2,205,017,000	Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah penyelenggaraan promosi	1	Kali	2,419,079,800	
									Persentase Peningkatan Tujuan Ekspor	0	%		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian			Kebutuhan Dana (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
									Jumlah Calon Pelaku Usaha Ekspor yang Memenuhi Syarat	7	Orang		
31	Pameran Dagang Nasional	Kab. Balangan	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam pameran dagang	10	Pelaku usaha	2,168,377,900	Pameran Dagang Nasional	Kab. Balangan	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam pameran dagang	10	Pelaku usaha	2,279,517,900	
32	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Kab. Balangan	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang dibina	3	Pelaku usaha	36,639,100	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Kab. Balangan	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang dibina	3	Pelaku usaha	139,561,900	
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		PERSENTASE PENINGKATAN JUMLAH PRODUK YANG DIPASARKAN MELALUI KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA	27	%	133,810,000	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		PERSENTASE PENINGKATAN JUMLAH PRODUK YANG DIPASARKAN MELALUI KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA	27	%	137,310,000	
									PERSENTASE PENINGKATAN NILAI PRODUK LOKAL	0	%		
XVII I	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		Jumlah pelaksanaan promosi dan pemasaran	8	Kali	133,810,000	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		Jumlah pelaksanaan promosi dan pemasaran	8	Kali	137,310,000	
									Nilai Transaksi Promosi Perdagangan	1.279.200.000	Rupiah		
									Persentase Produk Lokal Perdagangan yang Berkualitas	20.00	%		
33	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di	Kab. Balangan	Jumlah UMKM yang melakukan pemasaran produk dalam negeri	10	UMKM	133,810,000	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di	Kab. Balangan	Jumlah UMKM yang melakukan pemasaran produk dalam negeri	10	UMKM	137,310,000	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Tingkat Kabupaten/Kota		melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhorelan dan jasa akomodasi				Tingkat Kabupaten/Kota		melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhorelan dan jasa akomodasi				
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		PERSENTASE BARANG BEREDAR YANG DIAWASI YANG SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN	78	%	210,812,300	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		PERSENTASE BARANG BEREDAR YANG DIAWASI YANG SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN	78	%	217,792,200	
			PERSENTASE ALAT – ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPAN NYA (UTTP) BERTANDA TERA SAH	22	%				PERSENTASE ALAT – ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPAN NYA (UTTP) BERTANDA TERA SAH	22	%		
									PERSENTASE JUMLAH KEGIATAN METROLOGI LEGAL DILAKSANAKAN	61.53	%		
									PERSENTASE JUMLAH KEGIATAN PENGAWASAN METROLOGI LEGAL DILAKSANAKAN	20.83	%		
XIX	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		Jumlah alat UTTP yang sudah ditera/tera ulang	1200	Buah	210,812,300	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		Jumlah alat UTTP yang sudah ditera/tera ulang	1200	Buah	217,792,200	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian			Kebutuhan Dana (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah temuan barang tidak layak edar	80	Buah				Jumlah temuan barang tidak layak edar	80	Buah		
									Jumlah SDM Kemetrolgian yang memperoleh sertifikasi teknis	2	Orang		
									Jumlah Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda Tera Sah	1200	Buah		
									Jumlah Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) dan BDKT yang diawasi dan sesuai ketentuan	100	Buah		
34	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Kab. Balangan	Jumlah alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat perlengkapan ditera ulang	1200	Unit	144,209,600	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Kab. Balangan	Jumlah alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat perlengkapan ditera ulang	1200	Unit	147,689,400	
35	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Kab. Balangan	Jumlah pelaku usaha dibidang metrologi legal yang dibina	50	Orang	66,602,700	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Kab. Balangan	Jumlah pelaku usaha dibidang metrologi legal yang dibina	50	Orang	70,102,800	
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		PERSENTASE IKM YANG MENERAPKAN TEKNOLOGI INDUSTRI	10	%	446,141,800	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		PERSENTASE IKM YANG MENERAPKAN TEKNOLOGI INDUSTRI	12.00	%	1,108,923,400	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian			Kebutuhan Dana (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
XX	Penyusunan, penerapan dan evaluasi rencana pembangunan industri Kabupaten/Kota		Jumlah penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri kabupaten/kota	1	Laporan	446,141,800	Penyusunan, penerapan dan evaluasi rencana pembangunan industri Kabupaten/Kota		Jumlah penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri kabupaten/kota	1	Laporan	1,108,923,400	
									Jumlah IKM yang Memiliki SDM yang Bersertifikasi Sesuai Kebutuhan	0	IKM		
									Jumlah IKM yang Memiliki Teknologi	300	IKM		
36	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kab. Balangan	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana distribusi	1	Dokumen	446,141,800	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kab. Balangan	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana distribusi	1	Dokumen	1,108,923,400	
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI		PERSENTASE PRODUK INDUSTRI YANG BERSERTIFIKAT HALAL	8,71	%	99,758,300	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI		PERSENTASE PRODUK INDUSTRI YANG BERSERTIFIKAT HALAL	8,71	%	140,238,300	
									PERSENTASE PERTUMBUHAN IKM	1.68	%		
XXI	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan		Jumlah kegiatan rekomendasi penerbitan izin usaha industri	3	Kegiatan	99,758,300	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan		Jumlah kegiatan rekomendasi penerbitan izin usaha industri	3	Kegiatan	140,238,300	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)						Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)						
									Jumlah IKM yang Memiliki Izin	42	IKM		
37	Fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan IUI,IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan kabupaten / kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegritas dengan sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Kab. Balangan	Jumlah dokumen hasil fasilitasi verifikasi teknis pemenuhan kesesuaian persyaratan teknis perizinan berusaha sektor industri dan/atau dalam rangka perluasan usaha untuk bidang usaha dengan resiko usaha menengah-tinggi dan tinggi, melalui SIINas yang terintegritas dengan sistem OSS	1	Dokumen	99,758,300	Fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan IUI,IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan kabupaten / kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegritas dengan sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Kab. Balangan	Jumlah dokumen hasil fasilitasi verifikasi teknis pemenuhan kesesuaian persyaratan teknis perizinan berusaha sektor industri dan/atau dalam rangka perluasan usaha untuk bidang usaha dengan resiko usaha menengah-tinggi dan tinggi, melalui SIINas yang terintegritas dengan sistem OSS	1	Dokumen	140,238,300	
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		PROFIL IKM YANG BERKEMBANG	0.58	%	1,065,995,800	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		PROFIL IKM YANG BERKEMBANG	0.58	%	1,170,589,500	
									PERSENTASE SKALA USAHA IKM YANG BERKEMBANG	0.58	%		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian			Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
XXII	Penyediaan informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah penyediaan informasi	1	Laporan	1,065,995,800	Penyediaan informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah penyediaan informasi	1	Laporan	1,170,589,500		
									Nilai Pemasaran Produk IKM	263.187	Rupiah			
									Jumlah Produk IKM Bersertifikasi	135	IKM			
38	Fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan analisis data industri, data kawasan industri serta data lain lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan analisis data industri, data kawasan industri serta data lain lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1	Dokumen	124,230,800	Fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan analisis data industri, data kawasan industri serta data lain lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan analisis data industri, data kawasan industri serta data lain lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1	Dokumen	180,424,800		
39	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen gasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas Kabupaten/Kota	1	Dokumen	941,765,000	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen gasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas Kabupaten/Kota	1	Dokumen	990,164,700		
JUMLAH PAGU INDIKATIF						15,321,375,470	JUMLAH PAGU INDIKATIF						19,570,526,816	

Batunandi, Agustus 2024

Plt. Kepala Dinas,



ABDURRAHMAN ARRAHIMI, S.Pi

Pembina Tk. I/IV/b

NIP. 19681117 199703 1 003

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Perubahan Renja ini dapat bersumber dari usulan SKPD, dari masukan pihak legislatif (DPRD) maupun aspirasi dari masyarakat dimana usulan-usulan Program dan Kegiatan tersebut telah dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan dari tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan yang terkait dengan usulan yang bersumber dari sektor atau bidang Sosial Ekonomi biasanya meliputi usulan mengenai pemberdayaan masyarakat, perkuatan modal, pembinaan pelaku usaha dan bantuan peralatan usaha bagi pelaku usaha.

Semua usulan masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) dan usulan dari pokok pikiran (Pokir) pihak legislatif/DPRD akan diverifikasi dan apabila sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan dan atau apabila memungkinkan akan dilaksanakan dengan mempertimbangkan skala prioritas dan ketersediaan dana yang ada akan diakomodir pada program dan kegiatan perubahan pada tahun anggaran 2023.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan sasaran dan prioritas bidang pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

RPJPN 2005-2025 dilaksanakan dalam empat tahapan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) dengan rumusan arahan prioritas kebijakan sebagai berikut :



Sesuai dengan tahapan tersebut, pembangunan dalam RPJMN ke-IV (2019-2025) diarahkan untuk Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan diberbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif diberbagai wilayah yang didukung oleh Sumber Daya Manusia berkualitas dan berdaya saing.

Secara garis besar arah pembangunan nasional Tahun 2019-2025 adalah sebagai berikut :

1. Reformasi pembangunan yang telah berjalan perlu dilanjutkan dan diperkuat untuk menciptakan struktur perekonomian yang kokoh melalui

percepatan hilirisasi industri berbasis Sumber Daya Alam, mengurangi ketergantungan impor barang dan bahan baku, kepastian hukum dan penegakan hukum serta reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan.

2. Daya saing nasional masih harus ditingkatkan terutama untuk menghadapi dimulainya pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), meneruskan perbaikan neraca transaksi berjalan, memperkuat landasan pembangunan agar tidak masuk dalam negara berpendapatan menengah.

Dalam upaya mendukung pencapaian laju pertumbuhan ekonomi nasional, Kementerian Perindustrian mempunyai target kinerja pembangunan yang difokuskan pada Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia industri dengan beberapa indikator seperti tersedianya sumber daya manusia aparatur yang kompeten, terselenggaranya pelatihan industri berbasis spesifikasi dan kompetensi, terfasilitasinya pengembangan Sumber Daya Manusia industri, terfasilitasinya saranaperdagangan serta penguatan infrastruktur kelembagaan, Sedangkan target kinerja pembangunan pada kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah diprioritaskan pada peningkatan peran usaha mikro dan kecil dan koperasi dalam penanggulangan kemiskinan, dengan indikator, peningkatan akses permodalan bagi koperasi dan UMKM, perluasan dan penguatan akses pemasaran bagi koperasi dan UMKM, serta perluasan KUR melalui program peningkatan daya saing UMKM. Selain itu pengembangan keanggotaan koperasi melalui penyuluhan dan kaderisasi melalui program penguatan kelembagaan koperasi.

Dalam rangka sinkronisasi Program antara Program Nasional dengan Program Daerah, perlu dilakukan telaahan terhadap kebijakan nasional tersebut, oleh karena itu dalam penyusunan Perubahan Renja tahun 2023 kami memperhatikan pula prioritas dan program nasional. Adapun program yang akan kami rencanakan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Memperluas pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berpendapatan rendah.
2. Penyederhanaan prosedur dan perbaikan sistem informasi berupa kemudahan akses permodalan, pembinaan manajemen usaha serta pemasaran.
3. Pemberdayaan Koperasi dan UMKM dalam menumbuhkan iklim usaha kecil menengah yang kondusif.

4. Penempatan/Penyertaan Modal Negara/Daerah dalam rangka mendukung program KUR.
5. Peningkatan kemampuan teknologi industri untuk mendorong peningkatan kegiatan pemerintahan daerah yang bersifat padat karya untuk mengurangi angka pengangguran dalam rangka pengentasan kemiskinan, pembinaan dan penyelenggaraan pelatihan kerja.

Secara khusus program arah kebijakan program prioritas dan kegiatan SKPD kami di tahun 2024 adalah Program Perencanaan tenaga Kerja, Program Pelatihan kerja dan produktifitas tenaga kerja, Program Penempatan tenaga kerja, program Hubungan industrial. fasilitasi pembentukan koperasi, pendidikan dan pelatihan perkoperasian dan pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Secara umum tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan tidaklah terlepas dari tujuan yang ingin dicapai Kabupaten Balangan selama lima tahun kedepan yang mana tujuan tersebut telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan 2021-2026, yaitu Menurunnya Angka Pengangguran Terbuka dan Meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Adapun secara khusus tujuan yang ingin dicapai Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja
2. Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja
3. Meningkatnya Produktifitas Koperasi dan usaha Mikro

Adapun sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2024 adalah Meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sasaran tersebut kami upayakan dalam rangka salah satu pencapaian sasaran Kabupaten Balangan yaitu Kontribusi PDRB Sektor Pembinaan dan Pelatihan. Melalui pembinaan secara terus menerus terhadap calon tenaga kerja, Usaha Mikro, koperasi agar berdaya saing guna mendukung Misi 2 dalam

Menurunnya angka pengangguran terbuka serta meningkatkan perekonomian masyarakat balangan berbasis pertanian dan perkebunan, pariwisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Balangan.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Analisa Sosial Ekonomi

Analisa dilakukan pada 3 urusan pemerintahan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan yaitu :

1. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

a. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Koperasi adalah sokoguru perekonomian bangsa Indonesia. Namun perkembangan perkoperasian dirasakan masih belum mencapai kondisi terbaiknya. Banyak permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh Koperasi, dimana setiap koperasi menghadapi permasalahannya masing-masing yang beragam dan berbeda dengan koperasi lainnya. Begitu juga dengan pengelolaan koperasi, masih banyak koperasi yang belum mampu mengelola manajemen perkoperasian yang sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu, dipandang perlu adanya Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi yang bertujuan untuk melakukan monitoring dan pengawasan terhadap kepatuhan Koperasi pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik untuk kelembagaan koperasi, manajemen usaha ataupun manajemen operasional koperasi. Pemerintah memberikan akses yang luas kepada Koperasi untuk mengembangkan usahanya. Namun koperasi juga diberi batasan peraturan perundang-undangan yang wajib dipatuhi dan tidak boleh dilanggar oleh Koperasi. Kesemua itu dimaksudkan agar Koperasi benar-benar dapat membawa manfaat bagi anggotanya dan masyarakat sekitarnya.

b. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

Program ini dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan perkoperasian bagi para pegiat koperasi sehingga kapasitas dan kemampuan SDM Koperasi dapat ditingkatkan. Saat ini, kualitas kinerja kelembagaan koperasi dinilai masih rendah. Disamping itu,

regenerasi kepengurusan koperasi juga perlu disiapkan sebagai upaya menghadapi pergantian pengurus yang habis masa kepengurusannya. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian memberikan kesempatan bagi SDM Koperasi untuk dapat menimba ilmu perkoperasian baik yang menyangkut pengelolaan manajemen usaha, keuangan ataupun operasional koperasi lainnya. Pengelolaan koperasi harus sejalan dengan peraturan dan perundang-undangan perkoperasian dan turunannya.

c. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)

Guna meningkatkan peran pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal dalam rangka mewujudkan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Balangan, ketersediaan data pelaku UMKM menjadi sangat penting bagi pemerintah daerah dalam mengakselerasi intervensi program agar tepat sasaran berdasarkan karakter, kebutuhan dan lokasi usaha. Data juga sangat dibutuhkan untuk melihat bagaimana intervensi yang diberikan pemerintah daerah kepada pelaku usaha mampu meningkatkan kapasitas usaha. Data yang akurat, lengkap dan dinamis juga akan membantu pemerintah dalam melakukan monitoring dan evaluasi program-program pemberdayaan dan pengembangan UMKM serta sebagai dasar perumusan kebijakan Pemerintah Daerah. Pemberdayaan UMKM merupakan upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap UMKM sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Salah satu strategi pemberdayaan usaha mikro yaitu melalui kemitraan. Kemitraan adalah kerjasama yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung antara pelaku UMKM dengan usaha besar. Kemitraan dilakukan atas dasar saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan (Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Sebagai leading sector dalam pemberdayaan UMKM, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan memiliki mandat untuk mempersiapkan,

melaksanakan dan mengelola basis data bagi UMKM. Untuk mewujudkan Database UMKM tersebut, perlu ada dilakukan kegiatan pendataan UMKM dan bertanggungjawab memberikan fasilitasi kemitraan usaha supaya UMKM lokal lebih maju dan berkembang.

d. Program Pengembangan UMKM

Menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan serta daya saing UMKM melalui pemberian fasilitasi, bimbingan dan pendampingan. Dengan pemberian fasilitasi baik dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM serta desain dan teknologi maka UMKM berpotensi untuk dapat lebih meningkatkan usahanya sehingga dapat menumbuhkan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan untuk lebih meningkatkan perekonomian.

2. Urusan Ketenagakerjaan

- a. Meningkatkan penyelesaian perselisihan hubungan industrial
- b. Optimalisasi informasi lowongan kerja, dan tindak lanjut dari program yang telah dijalankan
- c. Optimalisasi kerjasama dengan perusahaan penerima tenaga kerja
- d. Meningkatkan informasi lowongan kerja
- e. Meningkatkan keterampilan tenaga kerja

3. Urusan Transmigrasi

- a. Pembinaan masyarakat Transmigrasi Lokal
- b. Meningkatkan sarana prasarana di kawasan transmigrasi
- c. Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar sector dan antar pelaku dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi

4.2 Program dan Kegiatan

a. Faktor-Faktor yang Menjadi Bahan Pertimbangan dalam Penetapan Program dan Kegiatan

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Program dilaksanakan dan dijabarkan dalam beberapa kegiatan. Program Perangkat Daerah merupakan program-program RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Perumusan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja pada Penyusunan Perubahan Renja tahun 2022 mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja sampai dengan Triwulan II tahun 2023.
2. Pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja sampai dengan Triwulan II tahun 2023.
3. Prioritas pengembangan sistem Perkoperasian, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan yang diwujudkan dalam kegiatan.

b. Uraian Garis Besar mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan Rancangan Perubahan RKPD tahun 2023

Perubahan Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja tahun 2023 disusun mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja tahun 2021-2026 yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Balangan tahun 2021-2026. Pergeseran anggaran antar kegiatan maupun antar jenis belanja, penambahan atau pengurangan anggaran dan penambahan atau penghapusan kegiatan sebagai akibat dari perkembangan keadaan yang tidak sesuai.

Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar

1. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 5.817.859.920,- dan sesudah perubahan menjadi Rp. 6.253.775.666,-

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 208.472.000,- dan sesudah perubahan menjadi Rp. 272.296.000,-
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 17.668.600,- dan sesudah perubahan menjadi Rp. 66.612.600,-
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 148.811.100,- dan sesudah perubahan menjadi Rp. 253.536.800,-
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 617.542.700,- dan sesudah perubahan menjadi Rp. 1.056.135.700,-
- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 0,- dan sesudah perubahan menjadi Rp. 1.045.746.600,-
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 225.161.150,- dan sesudah perubahan menjadi Rp. 285.747.000,-
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 267.283.400,- dan sesudah perubahan menjadi Rp. 331.051.100,-
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan anggaran sebelum

perubahan Rp. 207.799.900,- dan sesudah perubahan menjadi Rp. 187.749.900,-

- Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
 - Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 112.099.300,- dan sesudah perubahan menjadi Rp. 132.699.300,-
- Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
 - Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 46.330.000,- dan sesudah perubahan Rp. 66.330.000,-
- Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
 - Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
 - Sub Kegiatan Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 459.480.000,- dan sesudah perubahan menjadi Rp. 459.480.000,-
 - Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 278.100.000,- dan sesudah perubahan menjadi Rp. 687.499.800,-
 - Sub Kegiatan Penyusunan Basis Data Usaha Mikro dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 280.930.000,- dan sesudah perubahan menjadi Rp. 310.930.000,-
- Program Pengembangan UMKM
 - Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil

- Sub Kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 1.745.930.000,- dan sesudah perubahan menjadi Rp. 2.360.930.000,-

2. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

- Program Perencanaan Tenaga Kerja
 - Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 32.718.000,- dan sesudah perubahan menjadi Rp. 32.718.000,-
- Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja
 - Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
 - Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 21.366.200.000,- dan sesudah perubahan menjadi Rp. 45.561.805.000,-
 - Sub Kegiatan Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 827.780.000,- dan sesudah perubahan menjadi Rp. 827.780.000,-
 - Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 1.628.596.120,- dan sesudah perubahan menjadi Rp. 2.688.183.128,-
 - Kegiatan Konsultasi Produktifitas pada Perusahaan Kecil
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 245.373.000,- dan sesudah perubahan menjadi Rp. 245.373.000,-
 - Kegiatan Pengukuran Produktifitas Tingkat Kabupaten / Kota
 - Sub Kegiatan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 635.080.000,- dan sesudah perubahan menjadi Rp. 890.080.000,-

- Program Penempatan Tenaga Kerja
 - Kegiatan Pelayanan Antar Kerja di Daerah kabupaten / Kota
 - Sub Kegiatan Pelayanan antar Kerja dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 73.639.000,- dan sesudah perubahan menjadi Rp. 96.944.500,-
 - Sub Kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 134.049.000,- dan sesudah perubahan menjadi Rp. 134.049.000,-
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 50.692.000,- dan sesudah perubahan menjadi Rp. 50.692.000,-
 - Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 251.944.000,- dan sesudah perubahan menjadi Rp. 500.944.000
 - Kegiatan Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) daerah Kabupaten / Kota.
 - Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian LPTKS dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 14.155.000,- dan sesudah perubahan menjadi Rp. 14.155.000,-
 - Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja.
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 234.259.000,- dan sesudah perubahan menjadi Rp. 234.259.000,-
 - Sub Kegiatan Job Fair/Bursa Kerja dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 79.911.200,- dan sesudah perubahan menjadi Rp. 61.676.200,-
- Program Hubungan Industrial
 - Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 10.000.000,- dan sesudah perubahan menjadi Rp. 10.000.000,-
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 6.584.320.000,- dan sesudah perubahan menjadi Rp. 10.174.120.000,-
- Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota.
 - Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 148.139.900,- dan sesudah perubahan menjadi Rp. 267.939.900,-
 - Sub Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 16.690.000,- dan sesudah perubahan menjadi Rp. 16.690.000,-
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 59.605.000,- dan sesudah perubahan menjadi Rp. 179.405.000,-

3. Urusan Pemerintahan Pilihan, Urusan Bidang Transmigrasi

- Program Pembangunan kawasan Transmigrasi
 - Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (satu) daerah Kabupaten / Kota
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 20.798.000,- dan sesudah perubahan menjadi

Rp. 120.798.000,-

- Sub Kegiatan Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 164.474.400,- dan sesudah perubahan menjadi Rp. 164.474.000,-
- Program Pengembangan kawasan Transmigrasi
 - Kegiatan Pengembangan satuan pemukiman pada tahap kemandirian.
 - Sub Kegiatan Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 15.052.500,- dan sesudah perubahan menjadi Rp. 15.052.500,-
 - Sub Kegiatan Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 113.947.200,- dan sesudah perubahan menjadi Rp. 164.855.000,-

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada table 4.1 dibawah ini :

**Tabel 4.1
Program dan Kegiatan**

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang (10-12)	Keterangan
		Rp	Rp	Rp	
3	14	11	12	13	14
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA TENAGA KERJA		45.463.783.518,00	83.658.953.963,00	38.195.170.445,00	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		45.149.511.418,00	83.193.774.063,00	38.044.262.645,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA		34.197.348.428,00	63.791.010.928,00	29.593.662.500,00	
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA		32.718.000,00	32.718.000,00	0,00	
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)		32.718.000,00	32.718.000,00	0,00	
Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro					

	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.718.000,00	32.718.000,00	0,00	
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		26.507.226.328,00	52.017.418.328,00	25.510.192.000,00	
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		23.822.576.128,00	49.077.768.128,00	25.255.192.000,00	
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi					
	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.366.200.000,00	45.561.805.000,00	24.195.605.000,00	
Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja					

	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	827.780.000,00	827.780.000,00	0,00	
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi					
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.628.596.128,00	2.688.183.128,00	1.059.587.000,00	
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		1.804.197.200,00	1.804.197.200,00	0,00	
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta					
	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.804.197.200,00	1.804.197.200,00	0,00	

Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil		245.373.000,00	245.373.000,00	0,00	
Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil					
	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	245.373.000,00	245.373.000,00	0,00	
Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		635.080.000,00	890.080.000,00	255.000.000,00	
Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja					
	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	635.080.000,00	890.080.000,00	890.080.000,00	

PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		838.649.200,00	1.092.719.700,00	254.070.500,00	
Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota		510.324.000,00	782.629.500,00	272.305.500,00	
Pelayanan antar Kerja					
	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73.639.000,00	96.944.500,00	23.305.500,00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja					
	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	134.049.000,00	134.049.000,00	0,00	
Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan					

	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.692.000,00	50.692.000,00	0,00	
Perluasan Kesempatan Kerja					
	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	251.944.000,00	500.944.000,00	249.000.000,00	
Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		14.155.000,00	14.155.000,00	0,00	
Pengawasan dan Pengendalian LPTKS					
	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.155.000,00	14.155.000,00	0,00	

Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		314.170.200,00	295.935.200,00	-18.235.000,00	
Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online					
	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	234.259.000,00	234.259.000,00	0,00	
Job Fair/Bursa Kerja					
	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	79.911.200,00	61.676.200,00	-18.235.000,00	
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		6.818.754.900,00	10.648.154.900,00	3.829.400.000,00	

Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		6.594.320.000,00	10.184.120.000,00	3.589.800.000,00	
Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan					
	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan					
	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.584.320.000,00	10.174.120.000,00	3.589.800.000,00	
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		224.434.900,00	464.034.900,00	239.600.000,00	
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					

	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	148.139.900,00	267.939.900,00	119.800.000,00	
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					
	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.690.000,00	16.690.000,00	0,00	
Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota					
	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	59.605.000,00	179.405.000,00	119.800.000,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH		10.952.162.990,00	19.402.763.135,00	8.450.600.145,00	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		8.029.293.690,00	15.384.894.035,00	7.355.600.345,00	

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		36.373.000,00	53.753.000,00	17.380.000,00	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					
	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.610.000,00	24.300.000,00	8.690.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					
	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.763.000,00	29.453.000,00	8.690.000,00	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		6.214.055.040,00	7.786.832.735,00	1.572.777.695,00	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					

	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.836.707.900,00	7.308.685.595,00	1.471.977.695,00	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					
	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	377.347.140,00	478.147.140,00	100.800.000,00	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		73.960.000,00	1.171.600.000,00	1.097.640.000,00	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					
	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73.960.000,00	1.171.600.000,00	1.097.640.000,00	
Administrasi Umum Perangkat Daerah		909.191.200,00	1.519.007.000,00	609.815.800,00	

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.668.600,00	66.612.600,00	48.944.000,00	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	148.811.100,00	253.536.800,00	104.725.700,00	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	59.986.200,00	59.986.200,00	0,00	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					
	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56.707.600,00	74.260.700,00	17.553.100,00	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					

	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.475.000,00	8.475.000,00	0,00	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	617.542.700,00	1.056.135.700,00	438.593.000,00	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		0,00	3.706.246.900,00	3.706.246.900,00	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					
	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.045.746.000,00	1.045.746.000,00	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					

	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	910.760.000,00	910.760.000,00	
Pengadaan Mebel					
	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	384.108.100,00	384.108.100,00	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.365.632.800,00	1.365.632.800,00	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		492.444.550,00	616.798.100,00	124.353.550,00	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					

	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	225.161.150,00	285.747.000,00	60.585.850,00	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	267.283.400,00	331.051.100,00	63.767.700,00	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		303.269.900,00	530.656.300,00	227.386.400,00	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					
	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	207.799.900,00	187.749.900,00	-20.050.000,00	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					

	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.270.000,00	35.466.400,00	1.196.400,00	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					
	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	61.200.000,00	307.440.000,00	246.240.000,00	
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		112.099.300,00	132.699.300,00	20.600.000,00	
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota		112.099.300,00	132.699.300,00	20.600.000,00	
Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota					
	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	112.099.300,00	132.699.300,00	20.600.000,00	
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		46.330.000,00	66.330.000,00	20.000.000,00	

Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		46.330.000,00	66.330.000,00	20.000.000,00	
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi					
	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	46.330.000,00	66.330.000,00	20.000.000,00	
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		0,00	0,00	0,00	
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		0,00	0,00	0,00	
Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota					
	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	

PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		1.018.510.000,00	1.457.909.800,00	439.399.800,00	
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		1.018.510.000,00	1.457.909.800,00	439.399.800,00	
Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro					
	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	459.480.000,00	459.480.000,00	0,00	
Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro					
	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	278.100.000,00	687.499.800,00	409.399.800,00	
Penyusunan Basis Data Usaha Mikro					

	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	280.930.000,00	310.930.000,00	30.000.000,00	
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		1.745.930.000,00	2.360.930.000,00	615.000.000,00	
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil		1.745.930.000,00	2.360.930.000,00	615.000.000,00	
Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi					
	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.745.930.000,00	2.360.930.000,00	615.000.000,00	
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		314.272.100,00	465.179.900,00	150.907.800,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI		314.272.100,00	465.179.900,00	150.907.800,00	
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI		185.272.400,00	285.272.400,00	100.000.000,00	

Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		185.272.400,00	285.272.400,00	100.000.000,00	
Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					
	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.798.000,00	120.798.000,00	100.000.000,00	
Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran					
	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	164.474.400,00	164.474.400,00	0,00	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI		128.999.700,00	179.907.500,00	50.907.800,00	

Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian		128.999.700,00	179.907.500,00	50.907.800,00	
Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman					
	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.052.500,00	15.052.500,00	0,00	
Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman					
	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	113.947.200,00	164.855.000,00	50.907.800,00	
		45.463.783.518,00	83.658.953.963,00	38.195.170.445,00	

PENUTUP

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja tahun anggaran 2024 inimerupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Balangan secara keseluruhan. Rincian daftar program dan kegiatan yang termuat dalam Perubahan Rencana Kerja tahun anggaran 2024 diupayakan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta tepat waktu. Selain **input** yang baik, hal yang juga penting untuk diperhatikan adalah kualitas pelaksanaan kegiatan. **Input** dan **proses** akan memberikan **benefit** dan **impact** kepada **output** maupun **outcome**, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu semua pihak terkait, khususnya jajaran aparat yang ada pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan perlu mencermati berbagai rambu dan petunjuk didalam melaksanakan tugas serta mengemban tanggungjawabnya. Pelaksanaan tugas harus fokus pada upaya mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang secara tidak langsung juga akan berdampak pada pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang berupaya untuk mewujudkan Kabupaten Balangan dalam Membangun Desa, Menata Kota Menuju Balangan yang Lebih Maju dan Sejahtera.

Kesadaran untuk secara terus-menerus memperbaiki diri dan meningkatkan kinerja telah ditunjang dengan penganangan penerapan *Good Governance* dilingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan. Momentum ini sangat relevan untuk dimanfaatkan dalam rangka *revitalisasi* diri maupun organisasi.

Batumi, Agustus 2024

Kepala Dinas,



ABDURRAHMAN ARRAHIMI. S.Pi

Pembina Tk. I/IV/b

NIP. 19681117 199703 1 003